



dpmptsp
LUWU TIMUR

melayani anda, membangun bersama

RENJA PERUBAHAN Tahun 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan operasional tahun ke-3 (ketiga) Renstra DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2024, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Renja DPMPTSP Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 Perubahan ini.

Malili, Agustus 2024

KEPALA DINAS,

Andi Habil Unru,SE

Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP.19641231 19803 1 208

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
 BAB. I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
 BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD.....	 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	 19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	33
 BAB. III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA OPD	 34
 BAB. IV : PENUTUP.	 49

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2024 s.d Triwulan II...	9
Tabel II.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
Tabel III	Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
Tabel IV	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pencapaian realisasi investasi Provinsi dan pusat, pencapaian rata-rata penyelesaian perizinan dan nonperizinan, evaluasi dan pengawasan untuk pencapaian target kinerja. Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta tetap bersinergi dengan Program Nasional.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.1.2 Proses Penyusunan Renja OPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal : Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan : penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/Lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas : Perangkat Daerah forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir : Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjabarkan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Luwu Timur.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudin disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif,

lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapelitbangda Kab. Luwu Timur untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

- Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B.HK.11.111.21);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.
 19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 nomor 86);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan program dan kegiatan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu timur jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024;
2. Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD-P, KUA PPAS-P, RKA-P DPKPP Tahun Anggaran 2024
3. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan daerah;
4. Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi DPMPTSP di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan DPMPTSP
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi urusan masing-masing bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Pengendalian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai Triwulan II dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026, dijabarkan pula Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu dan Pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 tetap mengacu pada pencapaian indikator yang tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Evaluasi terhadap rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 meliputi tiga hal yaitu :

Kebijakan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan rencana dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 6 program dan 14 kegiatan, Sub Kegiatan 32 (tiga puluh Dua). Target tingkat capaian kinerja sasaran OPD tahun 2024 mencapai Rp 3.500.000.000.000,-. Adapun tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan indikator program utama masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Iklim dengan indicator jumlah investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional dengan target 40 Investor, untuk triwulan ke 2 dengan total target sebanyak 20 investor tercapai 5 investor dengan realisasi sebesar 25 %.
- Program Promosi Penanaman Modal Total target sebesar Rp 2.015.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.190.143.223.478 dengan Realisasi Triwulan II 59,06 % ;
- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP dengan target 95,00 % Realisasi triwulan II Tahun 2024 sebesar 96,32%
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 85,00 % untuk triwulan kedua dengan target 40 % dengan realisasi 47,05 %
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dimana Indikator Kinerja adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar, dengan target kinerja 100% , target triwulan I 25% realisasi 21,34 %, Target Triwulan II (dua) adalah 25 % realisasi 10 %

Tabel. 1

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN II
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
					I		II		III		IV					
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Semua Bidang															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	3.885.422.758		406.731.350		1.362.233.428		-		-	35	1.768.964.778	35,00%	45,53%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	85.525.350	-	9.030.000	-	16.750.700		-		-	-	25.780.700	0,00%	30,14%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	2	41.710.500	-	4.860.000	1	8.210.000					1	13.070.000	50,00%	31,34%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.379.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.907.650	-	-	1	1.571.200					1	1.571.200	50,00%	40,21%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	36.528.200	2	4.170.000	2	6.969.500					4	11.139.500	40,00%	30,50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	3.082.393.335	-	302.918.419	-	1.180.795.239		-		-	-	1.483.713.658	0,00%	48,14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	2.979.276.395	20	296.749.419	20	1.131.594.639					20	1.428.344.058	95,24%	47,94%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	103.116.940	4	6.169.000	4	49.200.600					8	55.369.600	44,44%	53,70%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	17.416.150	-	-	-	9.378.500		-		-	-	9.378.500	0,00%	53,85%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	17.416.150	1	-	1	9.378.500					2	9.378.500	50,00%	53,85%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan (%)	100	88.694.000	-	5.038.000	-	9.503.000		-		-	-	14.541.000	0,00%	16,39%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	43	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	14.924.000	1	-	1	1.400.000					2	1.400.000	50,00%	9,38%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	13	73.770.000	3	5.038.000	7	8.103.000					10	13.141.000	76,92%	17,81%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuh (%)	100	355.835.085	-	64.005.500	-	96.880.000		-		-	-	160.885.500	0,00%	45,21%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4.885.700	1	-	1	2.452.000					2	2.452.000	50,00%	50,19%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	18.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	7.648.385	1	-	1	2.702.000					2	2.702.000	66,67%	35,33%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	10.660.000	1	-	1	3.395.000					2	3.395.000	66,67%	31,85%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	7.500.000	15	1.710.000	15	2.310.000					30	4.020.000	50,00%	53,60%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.800.000	2	-	2	3.150.000					4	3.150.000	33,33%	29,17%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	270	295.841.000	35	62.295.500	75	82.871.000					110	145.166.500	40,74%	49,07%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan (%)	100	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (%)	100	156.308.838	-	25.739.431	-	30.982.459	-	-	-	-	56.721.890	0,00%	36,29%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	21.498.970	1	3.000.000	1	6.253.500				2	9.253.500	50,00%	43,04%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	58.009.868	3	4.739.431	3	6.728.959				6	11.468.390	50,00%	19,77%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	76.800.000	1	18.000.000	1	18.000.000				2	36.000.000	50,00%	46,88%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	83.250.000	-	-	-	17.943.530	-	-	-	-	17.943.530	0,00%	21,55%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	45.650.000	1	-	2	11.763.530					3	11.763.530	33,33%	25,77%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	22.600.000	5	-	10	6.180.000					15	6.180.000	31,91%	27,35%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83,35%	45,53%	
					Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional (Angka)	45	277.398.700		4.460.000		12.081.500		-		-		-	16.541.500	0,00%	5,96%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi (%)	100	62.399.000	-	4.460.000	-	5.725.000		-		-		-	10.185.000	0,00%	16,32%
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2	62.399.000	-	4.460.000	1	5.725.000					1	10.185.000	50,00%	16,32%	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam Peta Potensi kabupaten (%) (%)	100	214.999.700	-	-	-	6.356.500		-		-		-	6.356.500	0,00%	2,96%

	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	214.999.700	-	-	-	6.356.500					-	6.356.500	0,00%	2,96%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										11,25%	5,96%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rupiah)	3,8E+12	432.637.590		116.000.000		122.726.475		-		-	-	238.726.475	0,00%	55,18%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan (MoU)	7	432.637.590	-	116.000.000	-	122.726.475		-		-	-	238.726.475	0,00%	55,18%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	409.999.100	1	116.000.000	1	120.611.475					2	236.611.475	50,00%	57,71%
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	3	22.638.490	-	-	-	2.115.000					-	2.115.000	0,00%	9,34%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47,38%	55,18%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP (Persen)	77	316.309.450		63.200.700		51.000.600		-		-	76	114.201.300	98,12%	36,10%

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu (%)	100	316.309.450	-	63.200.700	-	51.000.600		-		-		114.201.300	0,00%	36,10%
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	6000	295.727.100	1.559	63.200.700	1.906	48.780.600					3.465	111.981.300	57,75%	37,87%
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25	20.582.350	13	-	9	2.220.000					22	2.220.000	88,00%	10,79%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										59,72%	36,10%
					Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Persen)	85	452.532.000		43.250.000		75.043.700		-		-	35	118.293.700	41,24%	26,14%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang Menyampaikan LKPM (%)	90	452.532.000	-	43.250.000	-	75.043.700		-		-	-	118.293.700	0,00%	26,14%

	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	9	61.719.000	2	3.927.000	-	1.150.000					2	5.077.000	22,22%	8,23%
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	244	226.305.000	-	-	86	50.900.000					86	50.900.000	35,25%	22,49%
	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	15	164.508.000	4	39.323.000	3	22.993.700					7	62.316.700	46,67%	37,88%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										37,62%	26,14%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Base yang Valid (Dokumen)	1	24.000.000		1.970.000		7.297.000		-		-		9.267.000	0,00%	38,61%

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola (%)	100	24.000.000	-	1.970.000	-	7.297.000		-		-	-	9.267.000	0,00%	38,61%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2	24.000.000	-	1.970.000	1	7.297.000					1	9.267.000	50,00%	38,61%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	38,61%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			5.388.300.498		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										71,37%	42,05%
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sedang	Sangat Rendah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.
2. Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional
3. Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN
4. Persentase pelaku Usaha yang taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal
5. Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP
6. Jumlah Database Penanaman Modal yang valid

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sampai dengan triwulan II tahun 2024 hasilnya, adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik.

Target fisik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 50 % untuk triwulan II sedangkan realisasinya adalah sebesar 45 %.

b. Kinerja Keuangan.

Target dan realisasi keuangan pada belanja langsung sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 dapat diinformasikan bahwa target keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar Rp. 4.036.711.336,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 2.265.994.753,- dengan capaian Kinerja Keuangan sebesar 42,03 %.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 2 (dua) dibawah ini :

Tabel 2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2016)	CAPAIAN										PROYEKSI	
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022
	Aspek Pelayanan Umum														
12	Penanaman Modal														
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	18	18	20	21	35	23	39	26	37	28	26	26	30
	- PMA	Perusahaan	5	5	3	6	3	6	3	7	4	7	5	5	5
	- PMDN	Perusahaan	13	13	17	15	32	17	36	19	33	21	21	21	25
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	(Juta Rp)	462.622	520.850	767.405	551.400	572.362	580.950	1.119.951	601.000	1.147.817	621.050	3.822.080	3.000.000	500.000
	- PMA	(Juta Rp)	112.622	111.350	268.605	117.900	120.117	124.450	603.035	131.000	549.259	137.550	2.185.879	2.500.000	300.000
	- PMDN	(Juta Rp)	350.000	409.500	498.800	433.500	452.245	456.500	516.916	470.000	598.558	483.500	1.636.201	500.000	200.000
12.3.	Rasio daya serap tenaga Kerja			178,1	208,5	179,3	367,3	180,4	202,3	181,6	162,3	182,2	278,9	160,01	170,01
12.4.	kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	(Juta Rp)	25.000	25.000	498.800	50.000	452.245	75.000	516.916	100.000	598.558	125.000	1.636.201	25.000	50.000
		%			121.81		90.67		128.51		135.45		328.19		

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal terdapat isi-isu penting guna meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur adalah peningkatan realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Langkah Strategis yang dilaksanakan Bidang Penanaman Modal guna mengatasi isu penting tersebut di atas adalah:

- a. Penyusunan regulasi untuk mempermudah investor melakukan investasi;
- b. Penyederhanaan prosedur pelayanan;
- c. Peningkatan kualitas kajian potensi Penanaman Modal;
- d. Pemangkasan alur birokrasi pelayanan;
- e. Peningkatan peran satuan Tugas Percepatan Berusaha;
- f. Meningkatkan fasilitas pengembangan Penanaman Modal.
- g. Peningkatan penyediaan data dan informasi penanaman modal.

Faktor-faktor penyebab tercapainya/terpenuhinya kinerja program/kegiatan, dalam pencapaian target SKPD, antara lain karena :

1. Mengutamakan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada Masyarakat dengan melakukan kegiatan pelayanan langsung jemput bola ke desa dan kecamatan seluruh wilayah kabupaten luwu timur.
2. Sebagai isu sentral “ Pelayanan Langsung yang merupakan Grend Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disambut baik oleh masyarakat.

Peningkatan Kompetensi SDM dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terutama dalam sistem program SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan).

Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu adalah :

*** Tantangan**

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya koordinasi antara instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam hal Perizinan Usaha untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana

masyarakat , sehingga seringkali terjadi permasalahan/konflik status tanah, jenis izin dan gangguan atau dampak yg dtimbulkan dari izin

*** Peluang**

1. Memberi peluang dalam melakukan perbaikan database khususnya untuk data terkait Perizinan;
2. Meningkatkan peran dari semua pihak mulai dari kabupaten, kecamatan hingga aparat desa dalam penanganan Perizinan;
3. Melakukan inovasi dalam efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat yang akan dicapai;
4. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait, Lembaga vertikal dan beberapa stakeholder yang mempunyai arah kebijakan yang sama dan saling mendukung;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahapan Perencanaan Renja OPD tetap mengacu kepada Permendagri 86 Tahun 2017 namun sesungguhnya tetap melakukan penyesuaian terhadap mekanisme yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri no 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi berbasis elektronik .

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan Perubahan RKPD tahun 2024, namun melalui pertimbangan dan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan.

Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan review rancangan awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam table berikut :

Tabel 3. Reviw Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024-

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.388.300.498			5.847.121.498	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.388.300.498			5.847.121.498	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar	100 %	3.885.422.758	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar	100 %	4.014.733.758	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	85.525.350	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	82.865.350	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.710.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	39.050.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.379.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.379.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.907.650	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.907.650	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	36.528.200	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	36.528.200	

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100 %	3.082.393.335	Presentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100 %	3.122.266.203	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.979.276.395	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.016.539.263	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	103.116.940	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	105.726.940	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	17.416.150	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	17.416.150	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.416.150	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.416.150	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	88.694.000	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	139.804.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	-	
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	14.924.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	22.874.000	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	73.770.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	116.930.000	

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	355.835.085	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	420.225.085	
11	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.885.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.885.700	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.500.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.500.000	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.648.385	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.648.385	
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.660.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.660.000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	8.220.000	
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10.800.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10.800.000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	295.841.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	352.511.000	
	- Belanja Jasa Tenaga Supir			36.000.000			36.000.000	
	- Belanja Perjalanan dinas			259.841.000			316.511.000	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	16.000.000	Presentasi BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	16.000.000	

18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	9.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	9.000.000	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.000.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	156.308.838	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	132.906.970	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	21.498.970	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	21.498.970	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	58.009.868	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	34.608.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.800.000	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	60 unit	83.250.000	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	60 unit	83.250.000	

26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	45.650.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	45.650.000	
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	22.600.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	22.600.000	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala Nasional	50 Investor	277.398.700	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala Nasional	50 Investor	277.398.700	
9.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	100 %	62.399.000	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	100 %	62.399.000	
29	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	62.399.000	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	62.399.000	
30	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	15 Dokumen	-	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	15 Dokumen	-	
10.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Jenis potensi yang disusun dalam Peta	100 %	214.999.700	Persentase Jenis potensi yang disusun dalam Peta	100 %	214.999.700	
31	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	214.999.700	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	214.999.700	

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi PMA dan PMDN	4 Triliun	432.637.590	Jumlah realisasi PMA dan PMDN	4 Triliun	762.147.590	
11.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan	6 MoU	432.637.590	Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan	6 MoU	762.147.590	
32	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	409.999.100	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	559.509.100	
33	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 Dokumen	22.638.490	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 Dokumen	202.638.490	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP	78 %	316.309.450	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP	78 %	316.309.450	
12.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan	100 %	316.309.450	Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan	100 %	316.309.450	
34	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4400 Pelaku Usaha	295.727.100	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4400 Pelaku Usaha	295.727.100	

35	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	20.582.350	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	20.582.350	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan	80 %	452.532.000	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan	80 %	452.532.000	
13.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat menyampaikan LKPM	90 %	452.532.000	Persentase Pelaku Usaha yang taat menyampaikan LKPM	90 %	452.532.000	
36	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	61.719.000	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	61.719.000	
37	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	226.305.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	226.305.000	

38	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	164.508.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	164.508.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database yang valid	1 Dokumen	24.000.000	Jumlah Database yang valid	1 Dokumen	24.000.000	
14.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100 %	24.000.000	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100 %	24.000.000	
39	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	24.000.000	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	24.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mendapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (tidak ada daftar E- musrenbang dan E – Pokir).

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN OPD

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Oleh sebab itu, Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah perubahan untuk tahun 2024. Matriks rumusan rencana kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) program yang mengalami perubahan, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Perubahan yang dilaksanakan pada program tersebut berupa pergeseran anggaran kegiatan. Kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dari dokumen rencana kerja dari Rp 5.388.300.498 menjadi Rp 5.847.121.498 sebelumnya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pagu awal Rp. 3.885.422.758,- pada perubahan menjadi Rp. 4.014.733.758,- disebabkan

adanya pergeseran anggaran sebesar Rp. 129.311.000,- yang terbagi kebeberapa sub kegiatan yang urgent untuk ditambahkan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Pagu Awal Rp. 277.398.700 pada Pagu perubahan tetap karena tidak ada pergeseran kegiatan.
3. Program Promosi Penanaman Modal dari pagu awal Rp 432.637.590 pada Pagu perubahan menjadi Rp 762.147.590,- atau bertambah Rp 329.510.000 pergeseran karena adanya penambahan untuk pameran temu Bisnis dan penambahan penyusunan strategi promosi komoditi unggulan.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dari Pagu Awal Rp 316.309.450,- pada perubahan tetap karena tidak ada penambahan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari pagu awal Rp 452.532.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dari pagu Awal Rp 24.000.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

**RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN 2024 KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Target	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Target	Pagu	Lokasi	Sumber			
1	2	3	4	9	12	14	15	18	19	20
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		5.847.121.498,00					5.931.220.665,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.847.121.498,00					5.931.220.665,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		5.847.121.498,00					5.931.220.665,00	
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4.014.733.758,00					4.343.961.481,00
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	82.865.350,00			DPMPTSP		100.816.402,00
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	39.050.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42.000.000,00
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.379.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.964.479,00
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.907.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.772.648,00
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	36.528.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40.079.275,00
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan</i>	100 %	3.122.266.203,00			DPMPTSP		2.966.718.662,00
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	21 Orang/bulan	3.016.539.263,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			2.853.941.001,00
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	105.726.940,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			112.777.661,00
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan</i>	100 %	17.416.150,00			DPMPTSP		17.574.063,00

	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	17.416.150,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17.574.063,00
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan</i>	100 %	139.804.000,00			DPMPTSP		156.336.990,00
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	43 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32.781.810,00
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen	22.874.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.300.000,00
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	4 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	13 Orang	116.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			81.255.180,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuhi</i>	100 %	420.225.085,00			DPMPTSP		489.898.713,00
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4.885.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.400.430,00

	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.927.270,00
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	7.648.385,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.733.411,00
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	10.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.943.042,00
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	60 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.500.000,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	150Laporan	10.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.000.000,00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	270 Laporan	353.231.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			423.394.560,00
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan</i>	100 %	16.000.000,00			DPMPTSP		337.381.212,00
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.500.000,00
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 Unit	9.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.000.000,00
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	7.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52.881.212,00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</i>	100 %	132.906.970,00			DPMPTSP		164.054.510,00
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	900 Laporan	21.498.970,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	60 Laporan	34.608.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63.378.166,00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	76.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78.676.344,00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	100 %	83.250.000,00			DPMPTSP		111.180.929,00
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	9 Unit	45.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.445.897,00
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	47 Unit	22.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.765.810,00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27.969.222,00
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	45 Angka	277.398.700,00					265.157.859,00
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi</i>	100 %	62.399.000,00			pelaku usaha		65.157.859,00
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	2 Dokumen	62.399.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65.157.859,00

	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase jenis potensi yang disusun dalam Peta Potensi kabupaten (%)</i>	100 %	214.999.700,00			Potensi Kabupaten		200.000.000,00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	214.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi PMA Jumlah Realisasi PMDN	2900000000000 900000000000 Rupiah Rupiah	762.147.590,00					426.163.530,00
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan</i>	7 MoU	762.147.590,00			Investor		426.163.530,00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen	559.509.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			382.454.450,00
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	3 Dokumen	202.638.490,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43.709.080,00
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP	77 %	316.309.450,00					387.122.410,00

	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu</i>	100 %	316.309.450,00			Masyarakat dan Pelaku Usaha		387.122.410,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	0 Pelaku Usaha	295.727.100,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360.599.910,00
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	6 Pelaku Usaha	20.582.350,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26.522.500,00
5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	85 %	452.532.000,00					471.000.000,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku usaha yang Menyampaikan LKPM</i>	90 %	452.532.000,00			UKM, Perusahaan		471.000.000,00
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	9 Kegiatan Usaha.	61.719.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL			150.000.000,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								

			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	244 Pelaku Usaha	226.305.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL			217.000.000,00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal								
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	15 Kegiatan Usaha	164.508.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL			104.000.000,00
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	1 Angka	24.000.000,00					37.815.385,00
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola</i>	100 %	24.000.000,00			DPMPTSP		37.815.385,00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	2 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37.815.385,00
	J U M L A H				5.847.121.498,00					5.931.220.665,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Anggaran Perubahan Pada Tahun 2024 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur sebesar Rp. 5.847.121.498,-.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai pada anggaran pokok dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai. Penyusunan Renja Tahun 2024 ini akan lebih dapat dirasakan manfaatnya apabila dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini memerlukan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, khususnya ASN pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan demi tercapainya sasaran yang diinginkan. Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Luwu Timur. .

KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat. Pembina Utama Muda

NIP.19851231 198703 1 208